

Pemerintah
Kabupaten Mahakam Ulu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Poros Ujoh Bilang - Long Bagun Kec. Long Bagun
Kaltim Kode Pos 75567

Website : <http://diskominfo.mahakamulukab.go.id>

E-mail : diskominfostandi@mahakamulukab.go.id





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ujoh Bilang, 12 Januari 2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN



Markus Wan, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19710713 200112 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.2. Anggaran	4
1.3. Dasar Hukum	5
1.4. Sistematika Laporan Kinerja.....	5
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
BAB III	22
AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja.....	22
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	23
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	23
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	25
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	28
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	30
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	31



3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....35

**3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....37**

3.2 Realisasi Anggaran 42

BAB IV 48

PENUTUP 48

LAMPIRAN..... 49





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2025.....	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025	8
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2025	11
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah	12
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	14
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	23
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	23
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	25
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	28
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	30
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	31
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	35
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	37
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).



Penyusunan LKJIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN mempunyai tugas :

Dinas merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN mempunyai fungsi :

Tugas

- Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan



Persandian dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi .

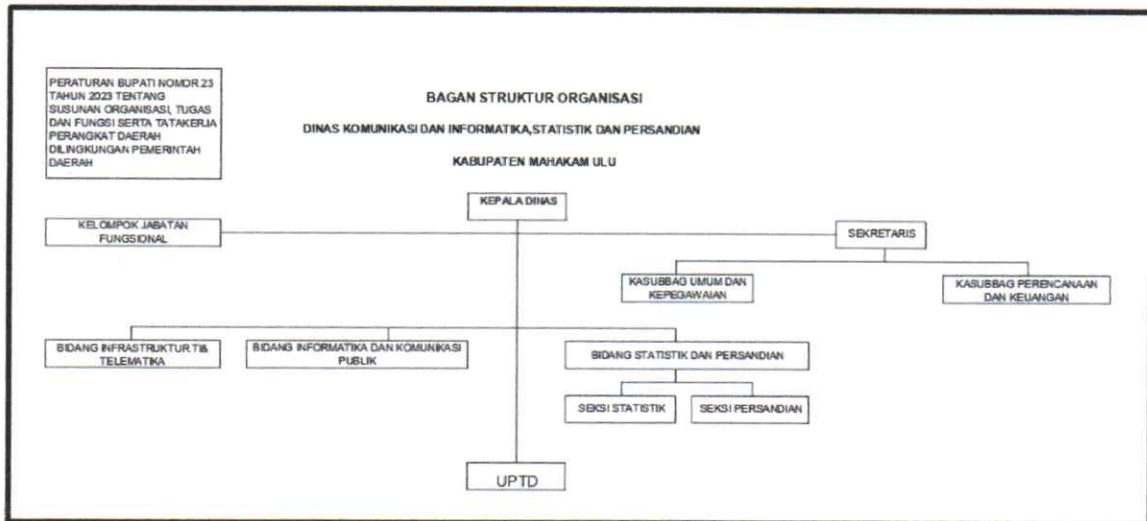
Kewajiban

- Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- Pembinaan kelompok unit pelaksana teknis dinas; dan
- Pembinaan kelompok unit pelaksana teknis dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN. Berikut bagan struktur organisasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN



Sumber : Peraturan Bupati nomor 23 Tahun 2023

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2025	Rp. 44.504.003.196
APBD	Tahun 2026	Rp. 35.904.983.059,93
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp

Sumber : Diskominfostandi



1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN Tahun 2025 adalah:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN adalah konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 sesuai visi misinya yaitu Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.1.1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	1.1. Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	87	91	94	96	98.8	
1.1.1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	1.1. Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	0	1	1	20	20	
1.1.1	Menin	1.1. Meningkatkan	Persentase	0	2	3	30	40	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	gkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	1.3	atnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
1.1.1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	1.1.1.4	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	2	3	30	45

Sumber : IKU Renstra Perubahan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.1.1	Meningkat	1.1.1.#.	Cakup	Luas			

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	kan Pelayanan Infrastruktur Dasar	1	an Layanan Telekomunikasi				
1.1.1.1	Meningkatnya Cakupan dan kualitas jaringan Telekomunikasi dan Internet	1.1.1.1# 0.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase	Memenuhi keperluan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan Telekomunikasi	luas wilayah yang ter- coverage / luas wilayah keseluruhan	bidang Infrastruktur TI dan Telematika
1.1.1.2	Meningkatnya Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	1.1.1.2# 0.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	Persentase	kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.	Jumlah KIM / Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kab.Kota X 100	Bidang IKP
1.1.1.3	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	1.1.1.3# 0.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persentase		Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam	bidang Statistik dan Persandian

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			menyusun perencanaan pembangunan daerah/Jumlah Organisasi Perangkat Daerah	
1.1.1.4	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	1.1.1.4# 0.1	Persentase		Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah/jumlah total perangkat daerah	bidang Statistik dan Persandian

Sumber: Renstra Perubahan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN Tahun 2021-2026 (Indikator Kinerja Utama)

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah. Berikut Rencana Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	1.1.1.1. Meningkatkan cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase	98,8
		1.1.1.2. Meningkatkan cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	Persentase	20
		1.1.1.3. Meningkatkan cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	40
		1.1.1.4. Meningkatkan cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi	Persentase	45

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dalam komunikasi Perangkat Daerah		
		1.1. Meningkatkan cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase Tingkat Cakupan penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase	70,30

Sumber : IKU Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Cakupan Layanan Telekomunikasi	98,8
1.1.1.1	Meningkatnya Cakupan dan kualitas jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	98,8
1.1.1.2	Meningkatnya Cakupan dan kualitas jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	20
1.1.1.3	Meningkatnya Cakupan dan kualitas jaringan Telekomunikasi dan Internet	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	40
1.1.1.4	Meningkatnya Cakupan dan kualitas jaringan Telekomunikasi dan Internet	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	45
1.1.1.5	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase Tingkat Cakupan penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Derah	70,30

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN:



**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
Tahun 2025**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	98,8 %
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2 Dokumen
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	3 Dokumen
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Aplikasi
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi	3 Dokumen



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		anggaran dan keuangan daerah	
	Penyelenggaraan Jaringan IntraPemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	28 Perangkat daerah
	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	20 Aplikasi
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	20 %
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%
	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan	5 %



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		perundangan	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	144 Konten
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	7 Orang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	40%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 %
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	37 Orang
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi	5 Persen



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	
	Peningkatan Kualitas Data StatistikSektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	5%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu DataIndonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadada	2 Dokumen
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	45 %
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %
	Penetapan Kebijakan Tata KelolaKeamanan Informasi dan JaringKomunikasi Sandi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan danPengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota Berbasis Elektronikdan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3 Perangkat Daerah
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
1.1.1 .4.1. 2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	36 Perangkat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	70,30%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	30 Orang



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 unit

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan



Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar						
1.1.1.1	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan	Cakupan Layanan Telekomunikasi	98,8	97,8	98,8	Sangat tinggi	bidang Infrastruktur TI dan Telematika

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	telekomunikasi dan internet						
1.1.1 .2	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	20	20%	100%	Sangat tinggi	Bidang IKP
1.1.1 .3	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	40	53,57%	100%	Sangat tinggi	bidang Statistik dan persandian
1.1.1 .4	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	45	35	77,8	tinggi	bidang Statistik dan Persandian

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026



Uraian penjelasan tabel :

Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada indikator kinerja cakupan layanan telekomunikasi dan Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan dengan kategori capaian kinerja sangat tinggi sedangkan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dikategorikan sangat tinggi melebihi target capaian dan untuk Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2025		
			2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Cakupan Layanan Telekomunikasi		89	95	94	97,07	98,8	97,8	98,8
1.1.1.1	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomuni	Cakupan Layanan Telekomunikasi		89	95	94,64	97,07	98,8	97,8	98,8



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2025		
			2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	(7)	(8)	(9)
	kasi dan internet									
1.1.1. 2	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	0	1	0	1	20	20	20	100%
1.1.1. 3	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0	0	0	0	30	40	53,57	100%
1.1.1. 4	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat	0	0	0	1	23	45	35	77,8

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2025		
			2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
		daerah								

Sumber : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu 2025

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 pada indikator kinerja cakupan layanan telekomunikasi dan Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan dengan kategori capaian kinerja sangat tinggi melebihi target, sedangkan di indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah capaian kinerja sangat tinggi diatas target indikator kinerja utama perangkat daerah selama satu tahun, pada indikator Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah kategori tinggi capai indikator didorong oleh pelaksanaan penggunaan tanda tangan elektronik.



3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Cakupan Layanan Telekomunikasi	97,8	98,8	97,8
1.1.1.1	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	97,8	98,8	97,8
1.1.1.2	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	20	20	100
1.1.1.3	Meningkatnya cakupan	Persentase Organisasi	53,57	40	100

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
1.1.1.4	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	35	45	77,8

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu 2025

Uraian penjelasan tabel :

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 pada indikator kinerja cakupan layanan telekomunikasi dan Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan dengan kategori capaian kinerja sangat tinggi mencapai target telah di tetap perangkat daerah selama satu tahun pelaksanaan sedangkan di indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan kategori sangat tinggi mecapai target, sedangkan Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dengan kategori tinggi walaupun belum mencapai

target di tetapkan dalam penggunaan tanda tangan elektronik telah dilaksanakan.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1 .1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Cakupan Layanan Telekomunika si			
1.1 .1.1	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunika si			
1.1 .1.2	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan pengembanga n dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan			
1.1 .1.3	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik			



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
		dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
1.1 .1.4	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah			

Sumber :

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. 1. 1	Meningkat kan Pelayanan Infrastruk tur Dasar						



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. 1. 1. 1	Meningkat nya cakupan dan kualitas jaringan telekomun ikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunik asi	98,8	97,08	98,26	Keberhasilan indikator kinerja Utama dilakukan percepatan dan pemerataan layanan telekomunikasi dan penyediaan alat menara telekomunikasi baik dari pemerintah provinsi maupun dari kementerian komunikasi. Kegagalan secara umum beberapa kendala dilapangan adanya proses pembangunan jalan utama menyebabkan seringnya Focut kabel optik menjadi masalah kondisi jaringan belum maksimal	Terus melakukan pemerataan daerah belum terjangkau mengunakan bakti aksi dan Visat Serta tim teknisi lapangan sigap dalam menangani kedala dalam perbaikan kabel utama
1. 1. 1. 2	Meningkat nya cakupan dan kualitas jaringan telekomun ikasi dan	Cakupan pengembang an dan pemberdaya an kelompok informasi Masyarakat ditingkat	20	20	100	Keberhasilan pencapaian Indikator pembentukan KIM dalam sosialisasi pembentukan Kelompok yang	Melakukan Pendataan kelompok dan melakukan sosialisasi berpotensi dan bersedia

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	internet	Kecamatan				berpotensi dan mampu melakukan Diseminasi Informasi serta bersedia menjadi Mitra Pemerintah dengan menggunakan media online dalam penyampaian informasi	menjadi mitra pemerintah serta
1. 1. 1. 3	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	40	53,57	100	Keberhasilan pencapaian indikator penggunaan data statistik dalam pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan adanya pelatihan kepada penyedia data/ produsen data serta penyusunan RPJDM dan Renstra perangkat daerah	Melakukan sosialisasi kepada produsen data Update data terbaru dalam aplikasi SISMUT



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. 1. 1. 4	Meningkat nya cakupan dan kualitas jaringan telekomun ikasi dan internet	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunaka n sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	35	45	77,8	Keberhasilan pengunaan TTE di lingkup perangkat daerah sudah baik Kendala Belum terpusatnya kantor pemerintah dan untuk server	Penyusunan regulasi internal tentang kewajiban penggunaan sandi. Penunjukan pengelola persandian pada masing- masing Perangkat Daerah. Penyediaan aplikasi dan sertifikat elektronik.

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu 2025

Uraian penjelasan tabel :

Keberhasilan dalam indikator kinerja tersedianya menara telekomunikasi yang tersedia dalam percepatan pemerataan telekomunikasi dan tersedianya alat penguat dari bakti aksi dan Visa tersedianya menara BTS.

pembentukan KIM yang berpotensi dan bersedia menjadi mitra pemerintah telah dilakukan sosialisasi di 5 kecamatan.

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah keberhasilan telah digunakan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan penggunaan pada penyusunan RPJMD dan RENSTRA perangkat daerah .

Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah keberhasilan telah diterapkan tanda tangan elektronik di setiap perangkat daerah.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	98,8	97,08	98,26	Rp. 41.788.497.515	Rp. 33.065.699.862	79,13	
1.1.1.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	98,8	97,08	98,26	Rp. 25.520.214.200	Rp. 19.934.342.370	78,11	
1.1.1.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	20	20	100	Rp. 1.405.696.000,00	Rp. 1.382.846.304,00	98,37	
1.1.1.3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data	40	53,57	100	Rp. 886.000.500,00	Rp. 637.653.202,00	71,97	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah							
1.1. 1.4	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	45	35	77,8	Rp. 793.433.900,00	Rp. 790.642.140,00	99,65	

Sumber : Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu 2025

Uraian penjelasan tabel:

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 pada indikator kinerja cakupan layanan telekomunikasi dan Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan dengan kategori capaian kinerja sangat tinggi melebihi target sedangkan di indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah melebihi target telah ditetapkan.





3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	97,08	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	97,08	menunjang	Sebagai Indikator Kinerja Utama
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	79,13	Menunjang	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi	100	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi	100	menunjang	Sebagai Indikator Kinerja Utama



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Komunikasi Publik	Masyarakat ditingkat Kecamatan			Masyarakat di Tingkat Kecamatan			a
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotora	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	98,37	Menunjang	
1.1.1.3.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	53,57	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	53,57	Menunjang	Sebagai Indikator Kinerja Utama
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kotora	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik	71,97		



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				a	Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota			
1.1.1.4 .1	Meningkat nya Penyeleng garan Persandian	Persentas e Perangkat Daerah yang telah mengguna kan sandi dalam komunika si perangkat daerah	77,8	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunak an sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	77,8	Menunjang	Indik ator Kiner ja Utam a
				Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Terselengg aranya Persandian untuk Pengamana n Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	99,69	Menunjang	
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kot a	Tersediany a Pola Hubungan Komunikas i Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	99,48		



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.5	Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja perangkat daerah/Dinas Kominfo/standi	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	65,25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	65,25		
1.1.1.5				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	79,29		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81,16		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,18		



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Daerah			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,18		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,09		

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Uraian penjelasan tabel:

Pencapaian Program /kegiatan menunjang keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan indikator kinerja Utama

1. Program Aplikasi Informatika target 98,8% Cakupan Layanan telekomunikasi dengan Realisasi Capaian 97,08% Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Capaian Realisasi sebesar 78,11%.
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik target 20% Persentase Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Realisasi Capaian 20% Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Capaian Realisasi 98,37%

Pencapaian program dan kegiatan yang menunjang dalam keberhasilan dalam pelayanan cakupan layanan telekomunikasi mencapai target yang telah di tentukan baik di RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Rp. 253.369.000	Rp. 199.505.845	78,74 %
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Rp.331.849.100	Rp.283.737.356	85,50 %
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Rp.248.416.000	Rp.187.953.359	75,66 %
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Rp.462.372.000	Rp.454.871.362	98,38 %
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp.23.827.072.500	Rp.18.601.503.064	78,07 %
	Koordinasi pemanfaatan	Rp.397.135.600	Rp.206.771.384	52,07 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Aplikasi Umum SPBE			
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Relasi Media	Rp.216.429.500	Rp.212.256.672	98,07 %
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp.167.706.000	Rp.166.284.802	99,15 %
	Pelayanan Informasi Publik	Rp.131.182.300	Rp.127.336.200	97,07 %
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp.97.309.600	Rp. 97.069.200	99,75 %
	Penyusunan Konten	Rp.587.517.600	Rp.587.003.896	99,91 %
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Rp.205.551.000	Rp.192.895.534	93,84 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp.311.219.200	Rp.118.436.400	38,06 %
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Rp.223.653.900	Rp.206.816.400	92 %
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp.126.788.800	Rp.123.210.800	97,18 %
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp.224.338.600	Rp.189.189.602	84,33 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Penetapan Kebijakan Tata KelolaKeamanan Informasi dan JaringKomunikasi Sandi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Rp. 232.152.000	Rp.232.122.200	99,99 %
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan danPengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Rp. 46.576.200	Rp. 45.255.000	97,16 %
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota Berbasis Elektronikdan Non Elektronik	Rp. 239.072.000	Rp.238.422.860	99,73%
	Penyediaan Layanan KeamananInformasi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Rp. 127.908.000	Rp. 127.881.800	99,98%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 147.725.700	Rp. 146.960.280	99,48%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat	Rp.206.445.500	Rp. 109.785.800	53,18%



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.19.087.600	Rp. 18.286.600	95,80%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 35.452.400	Rp. 35.265.600	99,47%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.228.314.800	Rp. 224.633.157	98,39%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.7.213.126.070	Rp. 5.780.427.893	80,14%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 379.560.000	Rp. 373.092.000	98,30%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 30.170.200	Rp.28.124.468	93,22%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.37.026.200	Rp. 35.050.400	94,66%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 999.096.500	Rp. 777.955.429	77,87%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 32.118.700	Rp. 21.669.000	67,64%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.32.506.000	Rp. 28.554.000	87,84%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 484.279.000	Rp. 480.174.862	99,15%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 8.100.000	Rp. 7.309.307	90,24%
	Penyediaan Peralatan dan	Rp. 540.425.945	Rp.436.177.376	80,71%



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perlengkapan Kantor			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.13.271.000	Rp.3.173.001	23,91%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8.565.000	Rp. 7.950.000	92,82%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 86.000.000	Rp. 35.020.581	40,72%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.2.772.282.000	Rp. 1.883.118.936	67,93%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.32.356.000	Rp. 22.847.436	70,61%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.24.970.000	Rp. 11.600.000	46,46%

Sumber : Realisasi fisik dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Uraian penjelasan tabel:

Penggunaan anggaran dalam program kegiatan mendukung dalam perjanjian kinerja kepala Organisasi Perangkat daerah sangat efisien dan efektif dengan capaian realisasi fisik dan keuangan mencapai 79,13% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.788.497.515 serta Realisasi sebesar Rp. 33.065.699.862 kegiatan yang mendukung pada indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian sebesar 79,13% pagu Anggaran Rp. 41.788.497.515 serta Realisasi Sebesar



Rp.33.065.699.862 tingkat penyerapan anggaran Efektif
mendukung Perjanjian Kinerja.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN ini dapat menggambarkan kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN memiliki empat sasaran strategis dengan dua sasaran strategis tercapai dan dua sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN adalah kendala dalam pelayanan publik baik itu penyediaan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat yang masih rendah.



3. Pada penyediaan layanan jaringan sering terkendala dikarenakan adanya peningkatan akses jalan yang menyebabkan tidak maksimal layanan jaringan internet.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan kelompok berpotensi dan bersedia menjadi mitra pemerintah.
2. Meningkatkan pemerataan layanan akses jaringan keseluruhan kecamatan
3. Peningkatan dalam penguasaan sandi pada perangkat daerah

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Ujoh Bilang, 12 Januari 2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Markus Wan, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19710713 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Poros Ujoh Bilang - Long Bagun Kec. Long Bagun Kaltim Kode Pos 75567
Website : <http://diskominfo.mahakamulukab.go.id>
Email : diskominfo@mahakamulukab.go.id / [email : kab_mahakam_ulu@sanapati.net](mailto:kab_mahakam_ulu@sanapati.net)

UJOH BILANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MARKUS WAN, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Ujoh Bilang, 02 Januari 2025

Kepala Dinas,
Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian,

Markus Wan, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710713 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Poros Ujoh Bilang - Long Bagun Kec. Long Bagun Kaltim Kode Pos 75567
Website : <http://diskominfo.mahakamulukab.go.id>
Email : diskominfostandi@mahakamulukab.go.id / [email : kab_mahakam_ulu@sanapati.net](mailto:kab_mahakam_ulu@sanapati.net)
UJOH BILANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MARKUS WAN, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH.,M.E
Jabatan : Bupati Mahakam Ulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Bupati Mahakam Ulu


Dr. Bonifasius Belawan Geh, SH. M.E

Ujoh Bilang, 02 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan Persandian,


Markus Wan, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710713 200112 1 003



PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian


No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	98,8%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	20%
3	Meningkatnya penyelenggaraan statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	40%
4	Meningkatnya penyelenggaraan persandian	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	45%
5	Meningkatnya Penerapam akuntabilitas kinerja perangkat daerah / dinas Kominfostandi	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	70,30%

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	Rp. 12.695.752.546
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.937.590.000
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 27.112.238.150
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 1.128.609.500
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 1.629.813.000
Total		Rp. 44.504.003.196

Pihak Kedua,
Bupati Mahakam Ulu,


Dr. Bonifasius Belawan Geh. SH. M.E

Ujoh Bilang, 02 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan Persandian,


Markus Wan. S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710713 200112 1 003

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN selama 5 tahun

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran/Program (action), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Kinerja pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	target	rp	
Misi 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan																	
Meningkatnya capaian dan kualitas layanan telekomunikasi dan internet	Capaian Layanan Telekomunikasi	84	85	698.000.000	89	4.790.000.000	94	7.825.000.000	94	2.040.000.000	100	1.816.000.000	100	2.128.000.000	100	15.783.000.000	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Capaian pengimanan dan penyediaan informasi Masyarakat d Tingkat Kecamatan	0	0	698.000.000	1	1.820.000.000	1	2.848.000.000	1	1.260.000.000	1	1.035.900.000	1	1.348.000.000	5	7.508.300.000	
	Capaian Layanan Telekomunikasi	84	85		89		94		94		100		100		100		
Meningkatnya informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota																	
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik					30%	300.000.000	50%	400.000.000	80%	800.000.000	100%	600.000.000				
Monitoring Opini dan Apresiasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Apresiasi Publik					30%	280.000.000	50%	380.000.000	80%	460.000.000	100%	590.000.000				



Lampiran 4 LHE SAKIP DISKOMINFOSTANDI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
I N S P E K T O R A T
Jl. Gunung Belareq Gang Dunhill RT. VII Kec.Long Bagun
UJOH BILANG

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 090/24/INSPEKTORAT/IV/2025 tanggal 09 April 2025. Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, telah disepakati Hasil Evaluasi dan Penilaian SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- I. Hasil Evaluasi Sistem AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 memperoleh nilai sebesar **65.25 (Enam Puluh Lima Koma Dua Lima)** atau dengan predikat penilaian **B (Baik)** sebagaimana tabel berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2023	Nilai 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan Kinerja	30	21.60	20.00
2	Pengukuran Kinerja	30	17.40	20.25
3	Pelaporan Kinerja	15	9.00	10.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15.00	15.00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	63.00	65.25
	Kategori Penilaian		B	B



II. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30.00 memperoleh nilai atau skor sebesar 20.00 dengan rincian sub komponen sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh nilai 6.00 dari nilai maksimal 6.00, yang terdiri dari:
 - a. Pedoman teknis perencanaan kinerja berupa SOP Penyusunan Renstra dan SOP Penyusunan Renja;
 - b. Dokumen perencanaan kinerja jangka Panjang berupa RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Renstra Tahun 2021-2026 dan Perubahannya yang telah diformalkan;
 - d. Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa rencana kerja perubahan belum dilampirkan;
 - e. Dokumen perencanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung kinerja berupa rencana aksi 2024, PK 2024, *cascading*, pohon kinerja namun *crosscutting* belum dilampirkan;
 - f. Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta perubahannya;
 - g. Legalitas dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah berupa Perkada/SK Penetapan Renja, Renstra dan RKA/DPA.
2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) memperoleh nilai 6.75 dari nilai maksimal 9.00 yang terdiri dari:



- a. Dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan berupa dokumen Renstra, Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Renstra dan Renja, Rencana Aksi, IKU, dan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan RKA/DPA;
 - b. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai pada beberapa perjanjian kinerja belum sesuai dengan dengan Perbup No. 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 - c. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis namun terdapat inkonsistensi target pada SKP Kepala Dinas dengan Renstra;
3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 7.75 dari nilai maksimal 15.00 yang terdiri atas:
- a. Laporan monitoring dan evaluasi per triwulan atas rencana aksi telah dilampirkan namun belum memadai;
 - b. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis namun terdapat inkonsistensi target pada SKP Kepala Dinas dengan Renstra;

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30.00 memperoleh nilai 20.25 dengan rincian sub komponen sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan memperoleh nilai 6.00 dari nilai maksimal 6.00 yang terdiri atas:
 - a. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang telah diformalkan;
 - b. Terdapat manual indikator belum menyajikan informasi yang valid yakni pada kolom penjelasan/formulasi perhitungan terdapat informasi formulasi perhitungan tanpa disertai angka/nilai yang jelas.



2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai 5.75 dari nilai maksimal 9.00 yang terdiri atas:
 - a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja dibuktikan dengan notulen namun belum dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi;
 - b. Laporan monitoring dan evaluasi per triwulan atas rencana aksi belum dilampirkan;
 - c. Laporan kinerja individu secara tahunan.

3. Pemenuhan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 8.50 dari nilai maksimal 15.00 yang terdiri atas:
 - a. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi dibuktikan dengan melampirkan dokumen matrik *refocusing* anggaran (memuat perbandingan pagu anggaran APBD Murni/Pergeseran/Perubahan), Renja Perubahan; DPA Pergeseran dan Perubahan;
 - b. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja berupa penilaian SKP bulanan namun belum dilampirkan.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15.00 memperoleh nilai atau skor sebesar 10.00 dengan rincian sub komponen sebagai berikut:

1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja memperoleh nilai 2.25 dari nilai maksimal 3.00 terdiri atas:
 - a. Bukti LKJIP telah direviu secara berjenjang oleh Sekretaris dan Kepala Dinas;
 - b. Dokumen LKJIP telah disampaikan tepat waktu berupa tangkapan layar (*screenshot*) telah mengunggah pada alamat <https://esr.menpan.go.id/>



2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai 4.25 dari nilai maksimal 4.50 yang terdiri atas:
 - a. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi capaian kinerja dengan 1 tahun sebelumnya/tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan analisis capaian kinerja (kenaikan/penurunan), permasalahan yang terjadi (alasan terjadinya kenaikan/penurunan), serta solusi yang diambil;
 - c. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan analisis perbandingan realisasi pencapaian target dengan realisasi keuangan serta dibandingkan dengan capaian dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 3.50 dari nilai maksimal 7.50 yang terdiri atas:
 - a. Laporan kinerja triwulan dikomunikasikan dalam rapat internal dalam rangka melaporkan capaian kinerja dibuktikan dengan notulen namun belum dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi;
 - b. Laporan monitoring dan evaluasi per triwulan atas rencana aksi belum dilampirkan.

- D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Evaluasi Internal dengan bobot penilaian sebesar 25.00 memperoleh nilai atau sebesar 15.00 dengan rincian sub komponen sebagai berikut:
 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai 4.00 dari nilai maksimal 5.00 yang terdiri atas:
 - a. Belum terdapat Perbup/SK yang mengatur tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal namun perangkat daerah telah memiliki SOP Evaluasi AKIP Internal;
 - b. Surat Tugas dalam rangka melakukan Penilaian Mandiri atas LKJIP Tahun 2024 diterbitkan bulan Februari 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Poros Ujoh Bilang - Long Bagun Kec. Long Bagun Kaltim Kode Pos 75567
Website : <http://diskominfo.mahakamulukab.go.id>
Email : diskominfostandi@mahakamulukab.go.id / [email : kab_mahakam_ulu@sanapati.net](mailto:kab_mahakam_ulu@sanapati.net)



KOMINFO

UJOH BILANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU**
Nomor : 870 /087 /Diskominfostandi.TU/1/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu;

- Mengingat
1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan acuan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu

untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 - 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diktum Kesatu disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal. Januari 2025

Kepala Dinas,

MARKUS WAN, S.Sos., M.S.i
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710713 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
7. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Perangkat Daerah : **Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu**

2. Visi Kabupaten Mahakam Ulu:

"Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera Berkeadilan "

3. Misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang berhubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu Misi ke- 1 :

1. Membangun Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Adil, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

4 Tugas Pokok : Melaksanakan Sebagian Tugas Kepala Daerah Dalam Urusan Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Serta Melaksanakan Pembantuan Sesuai dengan Bidang Tugasnya.

5 Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sesuai dengan Kebijakan Yang ditetapkan Bupati.
b. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Telematika, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Statistik Sektoral dan Persandian, Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Kesekretariatan, Keuangan dan Kepegawaiaan.
c. Pembinaan Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	98,8
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	20
3	Meningkatnya penyelenggaraan statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	40
4	Meningkatnya penyelenggaraan persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	45
5	Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Tingkat Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	70,30

Ditetapkan di Ujoh Bilang

Pada Tanggal Januari 2025



Kepala Dinas,

MARKUS WAN.S.Sos.,M.S.i
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19710713 200112 1 003

Lampiran IKU 2025
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAHAKAMA ULU

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi	$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Ter-coverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}} \times 100\%$	Laporan	Diskominfostandi
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$	Laporan	Diskominfostandi
3.	Meningkatnya penyelenggaraan statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Laporan	Diskominfostandi
4.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$	Laporan	Diskominfostandi
5	Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja perangkat daerah/dinas kominfostandi	Persentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	Hasil Evaluasi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Laporan	Diskominfostandi



Markus Wan, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19710713 200112 1 003